

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA CIMAHI

NOMOR : 15 TAHUN 2015

TANGGAL : 23 FEBRUARI 2015

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA CIMAHI

PEMERINTAH KOTA CIMAHI

MISI : 1. Mewujudkan Kreatifitas Dalam Segala Bidang;[?][?][?]

2. Meningkatkan Kesetaraan Dalam Pelayanan Publik

3. Meningkatkan Kemampuan Dalam Menanggapi Tantangan, Tuntutan dan Kondisi Masyarakat Secara Cepat

4. Mempertahankan Dinamika Perikehidupan Dalam Pembangunan

5. Mewujudkan Kesalehan Sosial Dalam Masyarakat Yang Berakhlak Mulia

6. Melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan

	Sasaran	IKU	Penjelasan	Sumber Data
1	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat dan berkembangnya sektor pertanian mendukung pengembangan ekonomi lokal berbasis klaster industri di Kota Cimahi	Pengembangan sektor pertanian dan perikanan daerah		
		Ketersediaan pangan utama	rata - rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg) dibagi jumlah penduduk dikali seratus persen	Diskopindagtan
		Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton) dibagi luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (Ha) dikali seratus persen	Diskopindagtan
		Regulasi ketahanan pangan	ada / tidak ada	Diskopindagtan
		Cakupan bina kelompok petani	jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemerintah tahun berjalan dibagi jumlah seluruh kelompok petani dikali seratus persen	Diskopindagtan
		Produksi perikanan	jumlah produksi ikan (ton) dibagi target daerah (ton) dikali seratus persen	Diskopindagtan
2	Meningkatnya daya saing daerah, kohesi sosial dan berkembangnya ekosistem inovasi daerah yang mendukung pengembangan ekonomi lokal berbasis industri kreatif, komunitas dan industri rumah tangga	Tingkat daya saing daerah		
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	KanPenmo
		Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	KanPenmo
		Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	realisasi PMDN tahun evaluasi dikurangi realisasi PMDN tahun sebelumnya dibagi realisasi PMDN sebelum evaluasi dikali seratus persen	KanPenmo
		Usaha Mikro dan Kecil	jumlah usaha mikro dan kecil dibagi seluruh UKM dikali seratus persen	Diskopindagtan
		Lama proses perijinan	rata - rata lama proses perijinan dalam hari	KPPT
		Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	KPPT
		Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	KPPT

	Sasaran	IKU	Penjelasan	Sumber Data
3	Berkembangnya usaha yang inovatif (khususnya UKM) berbasis industri kreatif, komunitas dan industri rumah tangga	Lembaga keuangan masyarakat di Kota Cimahi		
		Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	jumlah UKM aktif non BPR/LKM UKM	Diskopindagtan
4	Berkembangnya sektor pariwisata	Pengembangan daya tarik wisata berbasis budaya dan produk lokal		
		Kunjungan wisata	jumlah capaian kunjungan wisata kota dibagi jumlah seluruh kunjungan wisata dikali seratus persen	Diskopindagtan
		Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dibagi total benda, situs dan kawasan yang dimiliki daerah dikali seratus persen	Diskopindagtan
		Jumlah grup kesenian	jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	Diskopindagtan
		Jumlah organisasi kesenian	jumlah organisasi kesenian per 10.000 penduduk	Diskopindagtan
5	Terbangunnya kapasitas SDM dan kelembagaan pada koperasi serta pelaku usaha berbasis komunitas dan industri rumah tangga	Persentase koperasi aktif	jumlah koperasi aktif dibagi jumlah seluruh koperasi dikali seratus persen	Diskopindagtan
6	Pengembangan sektor perdagangan di Kota Cimahi	Menciptakan perdagangan dalam negeri yang efisien		
		Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemerintah tahun berjalan dibagi jumlah kelompok pedagang/usaha informal dikali seratus persen	Diskopindagtan
		Cakupan bina kelompok ikan air tawar	jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan binaan pemerintah tahun berjalan dibagi jumlah seluruh kelompok dikali seratus persen	Diskopindagtan
7	Meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja bagi pencari kerja	Tingkat pengangguran terbuka	jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja dibagi jumlah penduduk angkatan kerja dikali seratus persen	Disnakertransos
		Tingkat partisipasi angkatan kerja	jumlah angkatan kerja 15 tahun keatas dibagi jumlah penduduk usia kerja (15 th - 64 th) dikali seratus persen	Disnakertransos
		Angka partisipasi angkatan kerja	angkatan kerja 15 tahun keatas dibagi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas dikali seratus persen	Disnakertransos
8	Meningkatkan perlindungan, kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan pengawasan terhadap hak dan kewajiban pengusaha dan tenaga kerja	Cakupan Fasilitas Keselamatan dan perlindungan kerja	jumlah perusahaan yang menerapkan K3 pada tahun berjalan dibagi jumlah perusahaan seluruhnya dikali seratus persen	Disnakertransos

	Sasaran	IKU	Penjelasan	Sumber Data
9	Meningkatnya kualitas pendidikan yang merata dan memiliki daya saing	Angka melek huruf	jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dibagi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas dikali seratus persen	Disdikpora
		Angka rata-rata lama sekolah	kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan	Disdikpora
		APK SD/MI	jumlah penduduk yang pada tahun x dari berbagai usia sedang sekolah pada jenjang pendidikan y dibagi jumlah penduduk yang pada tahun x berada pada kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan y	Disdikpora
		APK SMP/MTs	jumlah penduduk yang pada tahun x dari berbagai usia sedang sekolah pada jenjang pendidikan y dibagi jumlah penduduk yang pada tahun x berada pada kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan y	Disdikpora
		APK SMA/SMK/MA	jumlah penduduk yang pada tahun x dari berbagai usia sedang sekolah pada jenjang pendidikan y dibagi jumlah penduduk yang pada tahun x berada pada kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan y	Disdikpora
		Angka Partisipasi Murni	Jumlah siswa usia sekolah dijenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dibagi Jumlah penduduk kelompok usia sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dikali seratus persen	Disdikpora
		APM SD/MI	Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang SD/MI/Paket A dibagi Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn dikali seratus persen	Disdikpora
		APMSMP/MTs	Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang SMP/MTs/Paket B dibagi Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn dikali seratus persen	Disdikpora
		APM SMA/SMK/MA	Jumlah siswa usia 16-18 thn dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C dibagi Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 thn dikali seratus persen	Disdikpora
		Angka partisipasi sekolah	jumlah sekolah SD/MI+SMP/MTs dibagi jumlah penduduk usia 7 s.d 12 tahun + usia 10 s.d 15 tahun dikali 10.000	Disdikpora
		Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	jumlah sekolah SD/MI+SMP/MTs dibagi jumlah penduduk usia 7 s.d 12 tahun + usia 10 s.d 15 tahun dikali 10.000	Disdikpora
		Rasio guru : murid SD/MI	jumlah guru SD/MI dibagi jumlah murid SD/MI dikali 10.000	Disdikpora

	Sasaran	IKU	Penjelasan	Sumber Data
		Rasio guru : murid SMP/MTs	jumlah guru SMP/MTs dibagi jumlah murid SMP/MTs dikali 10.000	Disdikpora
		Rasio guru/murid per kelas rata-rata	jumlah guru sekolah pendidikan dasar per kelas dibagi jumlah murid pendidikan dasar dikali 1000	Disdikpora
		Fasilitas pendidikan layak pakai pada seluruh jenjang pendidikan	jumlah sekolah dan ruang kelas layak pakai SD/MI, SMP/MTs dibagi jumlah seluruh sekolah dan ruang kelas pada jenjang pendidikan tersebut dikali seratus persen	Disdikpora
		Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	jumlah sekolah SD/MI kondisi bangunan baik dibagi jumlah seluruh sekolah SD/MI dikali seratus persen	Disdikpora
		Ruang Kelas SD/MI layak pakai	jumlah ruang kelas SD/MI layak pakai dibagi jumlah seluruh ruang kelas SD/MI dikali seratus persen	Disdikpora
		Sekolah pendidikan SMP/MTs layak pakai	jumlah sekolah SMP/MTs kondisi baik dibagi jumlah seluruh sekolah SMP/MTs dikali seratus persen	Disdikpora
		Ruang Kelas SMP/MTs layak pakai	jumlah ruang kelas SMP/MTs kondisi layak pakai dibagi jumlah seluruh ruang kelas dari seluruh jumlah SMP/MTs dikali seratus	Disdikpora
		Rasio Ruang Kelas : Rombel SD/MI	jumlah ruang kelas rombel SD/MI dibagi jumlah seluruh ruang kelas rombel	Disdikpora
		Rasio Ruang Kelas : Rombel SMP/MTs	jumlah ruang kelas rombel SMP/MTs dibagi jumlah seluruh ruang kelas rombel	Disdikpora
		Angka partisipasi sekolah	jumlah murid usia 16-19 tahun dibagi jumlah penduduk usia 16-19 tahun dikali 1000	Disdikpora
		Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	jumlah sekolah SMA/MA/SMK dibagi jumlah penduduk usia 16-19 tahun dikali 10.000	Disdikpora
		Rasio guru terhadap murid	jumlah guru SMA/MA/SMK dibagi jumlah murid SMA/MA/SMK dikali 10.000	Disdikpora
		Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	jumlah guru sekolah pendidikan menengah per kelas dibagi jumlah murid pendidikan menengah dikali 10.000	Disdikpora
		Fasilitas Pendidikan Menengah:		
		Ruang Kelas SMA/SMK/MA layak pakai	jumlah ruang kelas SMA/SMK/MA layak pakai dibagi jumlah seluruh jumlah ruang kelas SMA/SMK/MA dikali seratus persen	Disdikpora
		Rasio Ruang Kelas : Rombel SMA/SMK/MA	jumlah ruang kelas rombel SMA/SMK/MA dibagi jumlah seluruh ruang kelas rombel	Disdikpora
		Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis dibagi Jumlah penduduk usia 15th ke atas dikali seratus persen	Disdikpora
		Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):	jumlah siswa pada jenjang TK/RA/penitipan anak dibagi jumlah anak usia 4-6 tahun dikali 100	Disdikpora

	Sasaran	IKU	Penjelasan	Sumber Data
		Angka partisipasi kasar (APK) TK/RA/Penitipan Anak	Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak dibagi Jumlah anak usia 4 – 6 tahun dikali seratus persen	Disdikpora
		Angka Putus Sekolah (APTs)	jumlah anak putus sekolah seluruh jenjang pendidikan tahun tertentu dibagi jumlah seluruh anak pada seluruh jenjang tahun tertentu dikali 100 persen	Disdikpora
		APTs SD/MI	jumlah anak putus sekolah jenjang SD/MI tahun tertentu dibagi jumlah seluruh anak SD/MI tahun tertentu dikali 100	Disdikpora
		APTs SMP/MTs	jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP/MTs dibagi Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs dikali seratus persen	Disdikpora
		APTs SMA/SMK/MA	jumlah putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/ MA dibagi Jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya dikali seratus persen	Disdikpora
		Angka Kelulusan (AL):	Jumlah lulusan pada seluruh jenjang pendidikan dibagi jumlah siswa tingkat tertinggi pada seluruh jenjang pendidikan pada tahun ajaran sebelumnya dikali seratus persen	Disdikpora
		AL SD/MI	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI dibagi jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya dikali seratus persen	Disdikpora
		AL SMP/MTs	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs dibagi Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya dikali seratus persen	Disdikpora
		AL SMA/SMK/MA	Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA dibagi Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya dikali seratus persen	Disdikpora
		Angka Melanjutkan (AM)		
		AM dari SD/MI ke SMP/MTs	jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs dibagi Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya dikali seratus persen	Disdikpora
		Peningkatan kualitas dan mutu layanan pendidikan		
		AM dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/ MA dibagi Jumlah lulusan pd jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya dikali seratus persen	Disdikpora
		Kualitas Guru		
		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV dibagi Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dikali seratus persen	Disdikpora

	Sasaran	IKU	Penjelasan	Sumber Data
		SD/MI	jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV dibagi Jumlah Guru SD/MI dikali seratus persen	Disdikpora
		SMP/MTs	jumlah guru berijasah kualifikasi S1/DIV dibagi Jumlah Guru SMP/MTs dikali seratus persen	Disdikpora
		SMA/MA/SMK	jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV dibagi Jumlah Guru SMA/SMK/MA dikali seratus persen	Disdikpora
9	Meningkatnya Derajat kesehatan bagi semua lapisan masyarakat	Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh golongan masyarakat		
		Angka kematian bayi	jumlah kematian bayi tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu dikali seribu	Dinkes
		Angka usia harapan hidup	angka perkiraan lama hidup rata - rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Dinkes
		Persentase Balita gizi buruk	jumlah balita gizi buruk dibagi jumlah balita dikali seratus persen	Dinkes
		Peningkatan Peran serta masyarakat dalam peningkatan kesehatan		
		Rasio posyandu per satuan balita	jumlah posyandu dibagi jumlah balita dikali 1000	Dinkes
		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat		
		Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	jumlah poliklinik, puskesmas, pustu dibagi jumlah penduduk dikali 1000	Dinkes
		Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	jumlah rumah sakit dibagi jumlah penduduk dikali 1000	Dinkes
		Rasio dokter per satuan penduduk	jumlah dokter dibagi jumlah penduduk dikali 1000	Dinkes
		Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk	jumlah tenaga kesehatan dibagi jumlah penduduk dikali 1000	Dinkes
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Jumlah komplikasi kebidanan yg mendpt penanganan difinitif di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertetu dibagi Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja Pada kurun waktu yg sama dikali seratus persen	Dinkes
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan Di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah Kerja dalam kurn waktu yg sama dikali seratus persen	Dinkes
		Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Jumlah Desa / Kelurahan UCI dibagi Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan dikali seratus persen	Dinkes

	Sasaran	IKU	Penjelasan	Sumber Data
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelayanan Kesehatan di satu wil kerja pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan Di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama dikali seratus persen	Dinkes
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang Ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja selama 1 thn dibagi umlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama dikali seratus persen	Dinkes
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil kerja selama 1 thun dibagi jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wil dalam kurun waktu yang sama dikali seratus persen	Dinkes
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Jumlah kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan Strata 2 dan strata 3 dibagi Jumlah seluruh maskin di Kab/Kota dikali seratus persen	Dinkes
		Cakupan kunjungan bayi	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. sesuai standar di satu wilayah kerja pd Kurun waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pd Kurun waktu yang sama dikali seratus persen	Dinkes
		Cakupan puskesmas	jumlah puskesmas dibagi jumlah seluruh kecamatan dikali seratus persen	Dinkes
10	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	jumlah penduduk usia > 17 tahun ber KTP dibagi jumlah penduduk usia > 17 tahun atau telah menikah	Disdukcapil
		Rasio balita berakte kelahiran	jumlah penduduk ber KK dibagi jumlah penduduk yang telah menikah	Disdukcapil
		Kepemilikan KTP	jumlah penduduk yang memiliki KTP dibagi jumlah penduduk wajib memiliki KTP atau sudah menikah dikali seratus persen	Disdukcapil
11	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Pemberdayaan gender dan perlindungan anak		
		Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	jumlah pekerja anak usia 5-14 tahun dibagi jumlah pekerja usia 5 tahun keatas dikali seratus persen	Disnakertransos
		Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan	jumlah korban kekerasan yang ditangani dibagi jumlah seluruh rencana	BPMPKKB
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah dibagi jumlah pekerja perempuan dikali seratus persen	BPMPKKB
		Partisipasi angkatan kerja perempuan	jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dibagi jumlah angkatan kerja perempuan dikali seratus persen	Disnakertransos

	Sasaran	IKU	Penjelasan	Sumber Data
12	Meningkatnya kualitas keluarga sejahtera	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera		
		Cakupan peserta KB aktif	jumlah peserta program KB aktif dibagi jumlah pasangan usia subur dikali seratus persen	BMPPKB
		Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	jumlah keluarga pra sejahter dan sejahtera I dibagi jumlah keluarga dikali seratus persen	BMPPKB
13	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Pemberdayaan pemuda dalam pembangunan		
		Jumlah organisasi pemuda	jumlah organisasi pemuda	Disdikpora
		Jumlah kegiatan kepemudaan	jumlah kegiatan kepemudaan	Disdikpora
14	Meningkatnya sumberdaya olahraga	Pemberdayaan sumberdaya olahraga		
		Jumlah klub olahraga	jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	Disdikpora
		Jumlah gedung olahraga	jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk	Disdikpora
		Jumlah Stadion	Jumlah stadion	Disdikpora
		Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	jumlah gelanggang/balai remaja kota dibagi jumlah penduduk dikali 1000	Disdikpora
		Lapangan olahraga	jumlah lapangan olahraga kota dibagi jumlah penduduk dikali 1000	Disdikpora
		Jumlah kegiatan olahraga	jumlah kegiatan olahraga	Disdikpora
		Jumlah organisasi / klub olahraga	jumlah organisasi pemuda	Disdikpora
15	Meningkatnya perlindungan masyarakat	Upaya perlindungan sosial bagi masyarakat		
		Pemberdayaan PSKS	jumlah PSKS	Disnakertransos
		PMKS yg memperoleh bantuan sosial	jumlah PMKS yang diberikan bantuan dibagi jumlah seluruh PMKS dikali seratus persen	Disnakertransos
16	Berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan Pemerintahan	sistem informasi dalam rangka pelayanan publik		
		Web site milik pemerintah daerah	ada / tidak ada	KPPDE
17	Meningkatnya pelayanan administrasi Pemerintahan kepada semua masyarakat	Tertib administrasi pertanahan		
		Aset tanah yang belum tersertifikasi	jumlah aset tanah yang belum tersertifikasi dibagi jumlah seluruh aset tanah dikali seratus persen	Bag. Perlengkapan
		Persentase bidang lahan milik pemerintah yang bersertifikat	jumlah luas lahan milik pemerintah yang bersertifikat dibagi luas seluruh lahan milik pemerintah dikali seratus persen	Bag. Perlengkapan
		Aset tanah yang tersertifikasi	jumlah aset tanah yang tersertifikasi dibagi jumlah seluruh aset tanah dikali seratus persen	Bag. Perlengkapan
		Jumlah penyelesaian sengketa pertanahan	Jumlah penyelesaian sengketa pertanahan	Bag. Pemerintahan
		Pelayanan statistik daerah		
		Data Statistik Daerah	ada/tidak ada	Bapeda
		Peningkatan pelayanan kearsipan dan perpustakaan		

	Sasaran	IKU	Penjelasan	Sumber Data
		Pengelolaan arsip secara baku	jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku dibagi jumlah SKPD dikali seratus persen	KPPDE
		Peningkatan SDM pengelola kearsipan	persentase peningkatan SDM setiap tahun	KPPDE
		Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah dibagi jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah	KPPDE
		Jumlah perpustakaan	Jumlah perpustakaan	KPPDE
		Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	jumlah kunjungan ke perpustakaan selama setahun dibagi jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	KPPDE
18	Meningkatnya partisipasi warga kota dalam pembangunan	Kualitas dokumen perencanaan yang mengakomodasi aspirasi warga		
		Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	jumlah program RKPD tahun berkenaan dibagi jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan dikali seratus persen	Bapeda
19	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang aplikatif dan sesuai dengan kondisi	Dokumen perencanaan yang ditetapkan Kepala Daerah		
		Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	ada/tidak ada	Bapeda
		Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	ada/tidak ada	Bapeda
		Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	ada/tidak ada	Bapeda
20	Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kehidupan politis dan demokratis	Tingkat partisipasi pemilih	kenaikan atau penurunan jumlah pemilih dalam PEMILU	Kesbang
21	Terwujudnya kehidupan sosial kemasyarakatan yang toleran dan kondusif	Kualitas kehidupan keagamaan di Kota Cimahi		
		Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	jumlah tempat ibadah dibagi jumlah penduduk dikali 1000	DPU
22	Berkembangnya budaya masyarakat kota Cimahi	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Diskopindagtan
		Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Diskopindagtan
23	Meningkatnya disiplin dan toleransi masyarakat Kota Cimahi	Tingkat kesadaran warga terhadap ketentraman dan ketertiban		
		Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	jumlah Linmas dibagi jumlah penduduk dikali 10.000	Satpol. PP
		Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/Kelurahan	jumlah pos siskamling dibagi jumlah kelurahan	Satpol. PP
		Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota Cimahi	jumlah petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) di Kota Cimahi	Satpol. PP

	Sasaran	IKU	Penjelasan	Sumber Data
24	Mengembangkan infrastruktur transportasi disertai dengan manajemen yang handal dan terintegrasi	Tingkat Kemantapan Jalan dan Jembatan		
		Panjang jalan dilalui Roda 4 (Jalan Nasional, Provinsi dan kota)	jumlah panjang jalan (km) dibagi jumlah penduduk	DPU
		Jalan Penghubung dari ibukota Kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)	jumlah kawasan pemukiman penduduk yang belum dilalui kendaraan roda 4 dibagi jumlah seluruh kawasan pemukiman penduduk dikali seratus persen	DPU
		Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	panjang jalan kondisi baik dibagi panjang jalan seluruhnya	DPU
		Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase (km) dibagi panjang seluruh jalan kota (km) dikali seratus persen	DPU
		Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	panjang sempadan jalan yang dipakai PKL atau bangunan liar (km) dibagi panjang seluruh jalan sempadan kota dikali seratus persen	DPU
		Panjang jalan kota dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	panjang jalan kota dalam kondisi baik dibagi panjang seluruh jalan kota dikali seratus persen	DPU
25	Mengembangkan infrastruktur air bersih dan sanitasi dasar	Cakupan layanan pengelolaan air limbah masyarakat		
		Rumah tangga ber-Sanitasi	jumlah rumah tangga bersanitasi dibagi jumlah seluruh rumah tangga	DKP
		Persentase rumah tinggal bersanitasi	jumlah rumah tinggal berakses sanitasi dibagi jumlah rumah tinggal dikali seratus persen	DKP
		Cakupan layanan air bersih		
		Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	total jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih dibagi jumlah rumah tangga dikali seratus persen	DKP
		Rumah tangga pengguna air bersih	jumlah rumah tangga pengguna air bersih dibagi jumlah seluruh rumah tangga dikali seratus persen	DKP
		Menurunnya area genangan		
		Rasio Jaringan Irigasi	panjang saluran irigasi dibagi luas lahan budidaya pertanian	DPU
		Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (km) dibagi panjang seluruh drainase kota dikali seratus persen	DPU
		Cakupan layanan persampahan		
		Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	jumlah daya tampung TPS dibagi jumlah penduduk dikali 1000	DKP
		Persentase penanganan sampah	volume sampah yang ditangani dibagi volume produksi sampah dikali seratus persen	DKP
26	Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum penumpang	Penyelenggaraan manajemen dan sarana prasarana perhubungan		
		Angkutan darat	jumlah angkutan darat dibagi jumlah penumpang angkutan darat dikali seratus persen	Dishub

	Sasaran	IKU	Penjelasan	Sumber Data
		Jumlah Terminal	Jumlah terminal	Dishub
		Pemasangan Rambu-rambu	jumlah pemasangan rambu pada tahun berjalan dibagi jumlah rambu - rambu yang harus tersedia dikali seratus persen	Dishub
		Jumlah uji kir angkutan umum	merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor atau dibuat dan dirakit didalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan	Dishub
		Kepemilikan KIR angkutan umum	jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR tahun berjalan dibagi jumlah angkutan umum pada tahun berjalan dikali seratus persen	Dishub
		Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	jangka waktu proses pengujian angkutan umum	Dishub
27	Mewujudkan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berkelanjutan	Luasan RTH publik		
		Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah	luas ruang terbuka hijau dibagi luas wilayah kota dikali seratus persen	DPU
		Pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup		
		Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	Jumlah pelaku usaha yang memiliki dokumen lingkungan yang diawasi dibagi jumlah pelaku usaha yang memiliki dokumen lingkungan dikali seratus persen	KLH
		Penegakan hukum lingkungan		
		Pencemaran status mutu air	Jumlah pemukiman, industri dan sumber air yang dipantau mutu airnya dibagi jumlah keseluruhan pemukiman, industri dan sumber mata air dikali seratus persen	KLH
28	Mengembangkan perumahan dan permukiman layak yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana dasar umum	Cakupan penataan permukiman		
		Rumah layak huni	jumlah rumah layak huni dibagi jumlah penduduk	DPU
		Lingkungan permukiman kumuh	luas lingkungan permukiman kumuh dibagi luas wilayah dikali seratus persen	DPU
		Rasio permukiman layak huni	luas permukiman layak huni dibagi jumlah penduduk	DPU
		Rasio rumah layak huni	jumlah rumah layak huni dibagi jumlah penduduk	DPU
		Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk (per 1.000 jumlah penduduk)	jumlah daya tampung TPU dibagi jumlah penduduk dikali 1000	DKP
29	Merwujudkan penataan ruang kota yang berkelanjutan	Cakupan penataan ruang yang komprehensif dan integratif		
		Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	jumlah bangunan ber - IMB dibagi jumlah bangunan	DPU

	Sasaran	IKU	Penjelasan	Sumber Data
		Persentase Luas permukiman yang tertata	luas area permukiman tertata dibagi luas area permukiman keseluruhan dikali seratus persen	DPU
		Luas wilayah perkotaan	luas wilayah perkotaan dibagi jumlah luas seluruh wilayah rencana dikali seratus persen	DPU
30	Meningkatkan kinerja pengelolaan bangunan gedung/ rumah negara	Cakupan sarana prasarana perkantoran Pemerintahan / Kelurahan yang baik	jumlah sarana prasarana perkantoran yang baik dibagi jumlah penduduk dikali 10.000	DPU

WALIKOTA CIMAHI,

ATTY SUHARTI